

**PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Terhadap Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)**

**Oleh :
Sawardi**

Abstract

This paper is studies of The Jurisdicature principle Impementation Quickly In Corruption Crime Case. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : (1) Execution resistance of justice principle quickly in corruption crime case in Pontianak Justice of Corruption Crime because : a. Condition of defendant experiencing pain strenghtened by description of medical doctor, so that jurisdiction conference experiences the several postponement; b. Public procecuter cannot present witness for a few times court session because witness livings outside Pontianak City and the many witness from civil service occupying structural enough important, so that is not able yet to leaving duty to testify at the time of conference; c. One of judge councilor at the time of conference cannot present because obstructive while and/or executes other duty outside territory of jurisdiction of respected district court. (2) Positive impact of specifying of range of time 120 corruption crime case account days in district court as referred to Section 29 Law Number 46, 2009

Key words : Quick Justice, criminal offense

Abstrak

Makalah ini membahas masalah Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak dikarenakan : a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan; b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persdangan karena saksi berdomisili di luar Kota Pontianak dan banyaknya saksi dari PNS yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga belum dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan; c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan. (2) Dampak positif dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009

Kata Kunci : Peradilan Cepat, Tindak Pidana

Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diharapkan dapat berjalan dengan cepat sebagaimana dimaksud Pasal 29 yang menyatakan: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Sungguhpun demikian menurut praktiknya, ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 tersebut, tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya berbagai alasan, antara lain:

- a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan;
- b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan;
- c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan.
- d. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke pengadilan tipikor pada pengadilan negeri, sehingga memerlukan pengaturan jadwal sidang dan penetapan majelis hakim yang ketat.

Konsekuensinya, masa persidangan harus diperpanjang sampai diambilnya putusan oleh majelis hakim atau melampaui batas waktu 120 hari yang ditentukan Pasal 29 UU No. 46 tahun 2009. Sebagai contoh, perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak :

- a. Nomor: 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK dengan terdakwa Ir. Luluk Edi Priono, M.M., Anak dari Parwoto Tjahyono. Sidang pengadilan ditetapkan 30 Juni 2011, kemudian diputus 21 Februari 2012 atau menempuh waktu 163 hari atau melampaui **43 hari** dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009.
- b. Nomor: 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK dengan terdakwa Agustinus Joko Waluyo, ST.,M.M., Anak dari Antonius Tukidjo. Sidang pengadilan ditetapkan 30 Juni 2011, kemudian diputus 23 Februari 2012 atau menempuh waktu 165 hari atau

melampaui **45 hari** dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009.

Karena itu itu muncul pertanyaan, apakah terhadap pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi yang melampaui batas waktu 120 hari tersebut, dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum ataupun pertanggungjawaban administratif majelis hakim yang melaksanakan persidangan? Ternyata UU No 46 Tahun 2009 tidak mengatur perrtanggungjawaban tersebut baik berupa sanksi hukum maupun sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada majelis hakim, sedangkan penjelasan Pasal 29 hanya menyatakan “cukup jelas”. Jika demikian, maka timbul lagi pertanyaan apakah, maksud, tujuan dan manfaat dari diformulasikannya norma Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009?

Perlu ditegaskan, sesuai ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 7 UU No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau; c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Mengingat kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia sangat masif dan variatif, maka diperlukan upaya yang ekstra cepat untuk menuntaskannya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 29 sampai Pasal 32 UU No. 46 tahun 2009, yaitu:

- 1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.
- 2) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. dalam pemeriksaan tingkat banding.

- 3) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- 4) Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali.

Atas dasar ketentuan di atas, maka total waktu yang diperlukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 Hari atau 1 (satu) tahun. Padahal, jumlah perkara tindak pidana korupsi di Tanah Air setiap tahunnya meningkat, sebagai berikut :

- a. Selama periode tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011, BPKP telah menyerahkan hasil audit investigatif yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada instansi penyidik, yaitu : Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 1.016 kasus.
- b. Kemudian menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, sepanjang tahun 2011 KPK telah menyidik 65 kasus korupsi dan 75 perkara dalam tingkat penyelidikan dan berhasil menyelamatkan uang negara dari potensi kehilangan dengan total nilai sejumlah Rp 152, 957 triliun. Sedangkan total aset kekayaan negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp 152.957.821.529.773 rupiah.
- c. Selanjutnya berdasarkan keterangan pers Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus D Andhi Nirwanto ketika melakukan sosialisasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah Kudus, menyatakan :
 - 1) Jumlah perkara tindak pidana korupsi tahun 2010 sebanyak 4030 kasus : 2.315 kasus pada tahap penyidikan dan 1.715 kasus pada tahap penuntutan dengan jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak 354,52 miliar.
 - 2) Jumlah perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2011 sebanyak 1.018 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 825 perkara diantaranya sudah memasuki tahap penuntutan. Sedangkan data perkara tindak pidana korupsi se-Indonesia untuk tahap penyelidikan periode Januari-Agustus 2011 berjumlah 357 kasus, sebanyak 80 kasus di antaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Timur dan Sumatera Utara masing-masing menangani 36 kasus. Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan dari ratusan kasus tersebut, dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 68,46 miliar dan dalam bentuk dolar sebanyak 2.920,56 dolar AS.

Permasalahan

1. Mengapa asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009?
2. Apa dampak positif dan negatif dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009?
3. Bagaimana upaya penguatan ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 agar lebih berdayaguna dalam pelaksanaannya ke masa yang akan datang?

Pembahasan

1. Konsep Negara Hukum

Menurut Utrecht terdapat dua bentuk perkembangan konsepsi Negara Hukum, yaitu: Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.¹ Negara Hukum Formil dimaknakan sebagai Negara Hukum penjaga malam, artinya secara formal hanya dapat melakukan tindakan hukum apabila sudah diatur secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan Negara Hukum Materiel dimaknakan sebagai negara hukum kesejahteraan, di mana Negara harus pro aktif dalam memajukan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum daripada nilai kepastian hukum yang berbasis pada paham kekuasaan penyelenggara pemerintahan (hukum sebagai perintah penguasa).

Karena itu, Wolfgang Friedman membedakan antara '*rule of law*' dalam arti formil yaitu dalam arti '*organized public power*', dan '*rule of law*' dalam arti materiel yaitu '*the rule of just law*'.² Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran hukum formil ataupun oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum hanya dipahami secara kaku dan sempit, maka dalam tata pengaturan dan implementasinya tidak akan mampu mewujudkan nilai keadilan substantif.

Di samping istilah '*the rule of law*', oleh Friedman juga dikembangkan pula istilah '*the rule of just law*' untuk memastikan bahwa dalam pengertian '*the rule of law*'

¹ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, Hlm. 9.

² Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, gagasan Negara Hukum Indonesia, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Hlm. 1-3.

tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dan dalam lebih luas daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.³

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keempat tahun 2002, Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, telah dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima atau *supreme* dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁴

Mengenai unsur-unsur negara hukum modern, menurut **J. Stahl** haruslah memenuhi empat syarat pokok, yakni : (1) Negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, (2) Harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan harus berdasarkan hukum, (4) Harus ada peradilan administrasi.⁵ **Paul Scholten** hanya mengemukakan tiga unsur, yaitu : (1) Diakuinya hak-hak asasi manusia, (2) Adanya pemisahan kekuasaan, (3) Adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.⁶

Kemudian **Sri Soemantri** menyebut empat unsur, ialah : (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundangan, (2) Adanya jaminan hak asasi manusia (warga negara), (3) Adanya Pembagian kekuasaan dalam negara, (4) Adanya pengawasan dari badan peradilan (*rechterlijke controle*).⁷

Karena itu, sistem konstitusi yang menjadi salah satu gagasan normatif negara hukum, haruslah mengikuti empat prinsip imperatif konstitusionalisme, yaitu:

- (1) Seluruh kekuasaan politik harus tunduk pada hukum.
- (2) Adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- (3) Peradilan yang bebas dan mandiri,
- (4) Akuntabilitas publik, sebagai sendi utama kedaulatan rakyat. Supremasi hukum, merupakan ide normatif untuk mencegah atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan terjaminnya *equality before the law*.⁸

Selain itu, ide “**negara berdasarkan hukum**”, memunculkan keharusan imperatif

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, Hlm. 9. Lihat juga; Mahfud MD, 2001, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, UII Yogyakarta, Hlm. 25.

⁶ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995, Hlm. 9.

⁷ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, Hlm.10.

⁸ M. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, Hlm. 28.

agar seluruh kekuasaan politik tunduk pada hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia, merupakan ide normatif untuk menjamin hak-hak rakyat sebagai pihak yang diperintah.⁹

Checks and balances merupakan ide normatif untuk menghindari terjadinya absolutisme dalam pelaksanaan kekuasaan negara dan untuk menjamin berjalannya demokrasi.¹⁰ Sedangkan *rechterlijke controle*,¹¹ merupakan ide normatif untuk menghindari terjadinya pemaksaan kehendak oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, termasuk antara yang memerintah dan yang diperintah.

Demikian pula menurut **Jan Michiel** yang berpandangan : “semakin baik hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum. Sebaliknya, bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya”.¹²

2. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau **perekonomian negara**”.¹³

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

Kemudian yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena .¹⁵

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

⁹C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London, ELBS and Singwick & Jakson Limited, 1966, Hlm. 11.

¹⁰Bandingkan dengan M. Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit*, Hlm. 9.

¹¹Sri Soemantri, *Bunga Rampai...*, *Op. Cit*, Hlm.10.

¹² Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* [Reële Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden], diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, Hlm. 5-6.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Demikian pula yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara**, pengertiannya adalah:

“Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.¹⁶

Kedua unsur/elemen “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” hakikatnya bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai **delik formil** dan bukannya **delik materil**.

Menurut **Satochid Kartanegara**,¹⁷ delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.

Dalam hukum pidana juga dikenal adanya asas yang menyatakan bahwa “**tidak dipidana tanpa adanya kesalahan** (*Geen Straf Zonder Schuld*)”. Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan. Mengenai kesalahan, **Voss** memandang pengertian kesalahan mengandung 3 (tiga) ciri, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*Toerekeningsvatbaarheid van de Dader*).
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satochid Kartanegara, tt. Satochid, *Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, Hlm. 135-136

- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.¹⁸

Sedangkan menurut **Moeljatno**, untuk adanya kesalahan itu seorang pelaku perbuatan pidana harus:

- a. melakukan perbuatan pidana.
- b. di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. tidak adanya alasan pemaaf.¹⁹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana (delik) merupakan perbuatan yang dilarang dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman (sanksi) dan untuk adanya pertanggungjawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan.

3. Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam istilah/bahasa Inggris, kata “peradilan” disebut “*judiciary*”, sedangkan menurut istilah/bahasa Belanda disebut “*rechtspraak*” yang dimaknakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian istilah “pengadilan” disebut *court* (Inggris) dan *rechtbank* (Belanda) yang dimaknakan sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Karena itu, kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian: a. Proses mengadili. b. Upaya untuk mencari keadilan. c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan. d. Berdasar hukum yang berlaku.²⁰

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD 1945 menentukan :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, Hlm. 135.

¹⁹ Moeljatno, Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 164.

²⁰ Cik. Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 1.

yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian ketentuan konstitusi ini, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, serta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat pula dimaknakan bahwa peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia hakikatnya merupakan kekuasaan peradilan yang kewenangannya bersumber dari kekuasaan negara hukum Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Asas Hukum Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Secara harafiah, kata **azas** mengandung makna *dasar, fundamen, pangkal tolak, landasan*, dan/atau *sendi-sendi*.²¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata azas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat.²² Karena itu menurut **Yahya Harahap**,²³ dalam konteks **asas hukum peradilan**, suatu **asas hukum menjadi fundamen** atau **acuan umum** bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan dilakukan dengan **seederhana, cepat, dan biaya ringan**.²⁴

²¹ Eddy Yusuf Priyanto dkk, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, 2003, Hlm. 8.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hlm. 52.

²³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, 1993, Hlm. 37.

²⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan **tidak membedakan orang** (persamaan di hadapan hukum).²⁵
- c. Pengadilan **tidak boleh menolak** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁶
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah **terbuka untuk umum**, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁷

Terkait dengan pengertian di atas, menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan:

- a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.²⁸

5. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan-ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, antara lain :

1) Asas peradilan cepat :

- a. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik.
- b. Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik.
- c. Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- d. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
- e. Pelimpahan berkas perkara banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding. (Pasal 326).

²⁵ Pasal 5 ayat (1).

²⁶ Pasal 16 ayat (1).

²⁷ Pasal 19 ayat (1).

²⁸ Bambang Poernomo, Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1993, Hlm. 6.

- f. 7 hari setelah perkaranya diputus pada tingkat banding, pengadilan tinggi harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri. (Pasal 234 ayat (1)).
 - g. 14 hari dari tanggal permohonan kasasi pengadilan negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi. (Pasal 248).
 - h. 7 hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusannya ke pengadilan negeri. (Pasal 257).
- 2) Asas sederhana dan biaya ringan :
- a. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.
 - b. Pembatasan masa penahanan dengan hak tuntutan ganti rugi.
 - c. Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.
 - d. Meletakkan asas deferensiasi fungsional agar perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).
- 3) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan : Empat putusan dibawah ini tidak dapat dimintakan banding, dan ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa sekaligus merupakan acara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Pasal 67). yakni :
- a. Putusan bebas (vrijspraak),
 - b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging).
 - c. Kurang tepatnya penerapan hukum, dan
 - d. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

A. Hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak

1. Deskripsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Umum Pontianak diresmikan operasionalnya pada tanggal 28 April 2011 bersama 13 Pengadilan Tipikor lainnya yang dipusatkan di Banjarmasin. Pembentukannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Pengadilan Negeri Pontianak**, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jaya Pura.

Sejak bulan Mei 2011 sampai Desember 2011 Pengadilan Tipikor Pontianak mendapat limpahan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 18 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) perkara sudah berkekuatan hukum tetap;
- b. 13 perkara melakukan upaya hukum banding;

- c. 2 (dua) perkara sudah putus belum ada upaya hukum karena masih belum mencapai tujuh hari dari tanggal putus;
- d. 2 (dua) perkara belum putus;
- e. 3 perkara melakukan upaya hukum kasasi.

Pada Tahun 2012 dari Januari s/d April 2012 ada 2 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) perkara sudah putus dan berkekuatan hukum tetap.
- b. 1 (satu) perkara belum putus.

Jumlah Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pontianak sebanyak 10. orang terdiri atas Hakim Karier 6 orang dan Hakim Ad Hoc 4 orang.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.²⁹

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak terdiri atas:

- a. Pimpinan :³⁰
 - 1) Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
 - 2) Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi pengadilan kepada wakil ketua.
- b. Hakim :³¹
 - 1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
 - 2) Hakim Karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
 - 3) Hakim Karier selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
 - 4) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - 5) Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

³⁰ Selengkapnya diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 9 UU No. 46 Tahun 2009.

³¹ *Ibid*, Pasal 10.

c. Panitera :³²

- 1) Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera.
- 2) Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

2. Hukum Acara :³³

- a. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.
- b. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
- c. Dalam hal majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
- d. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
- e. Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

3. Penetapan Hari Sidang :³⁴

- a. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.
- b. Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:³⁵

- a. Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

5. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat

Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan bahwa Sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus

³² *Ibid*, Pasal 22 dan Pasal 23.

³³ *Ibid*, Pasal 25 dan Pasal 26.

³⁴ *Ibid*, Pasal 27.

³⁵ *Ibid*, Pasal 28.

oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden penelitian ini diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada prinsipnya sudah melaksanakan ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 tersebut. Namun, memang masih ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang baru dapat diputus setelah melampaui batas waktu 120 hari, antara lain :

c. Perkara Nomor: 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK dengan terdakwa Ir. Luluk Edi Priono, M.M., Anak dari Parwoto Tjahyono. Sidang pengadilan ditetapkan 30 Juni 2011, kemudian diputus 21 Februari 2012 atau menempuh waktu 163 hari atau melampaui **43 hari** dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009. Hal ini disebabkan:

- 1) Kondisi terdakwa yang mengalami sakit diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan;
- 2) Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar kota Pontianak;

d. Perkara Nomor: 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK dengan terdakwa Agustinus Joko Waluyo, ST., M.M., Anak dari Antonius Tukidjo. Sidang pengadilan ditetapkan 30 Juni 2011, kemudian diputus 23 Februari 2012 atau menempuh waktu 165 hari atau melampaui **45 hari** dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009. Hal ini disebabkan :

- 1) Kondisi terdakwa yang mengalami sakit diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan;
- 2) Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar kota Pontianak;

e. Perkara Nomor : Nomor: 06/Pid.Sus/TP.Korupsi/2011/PN.PTK dengan terdakwa Ir. Ketut Radiarta anak dari Nyoman Kuasa. Dilimpahkan Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Juni 2011, kemudian diputus 09 Februari 2012 atau menempuh waktu 157 hari atau melampaui **37 hari** dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009. Hal ini disebabkan :

- 1) Salah satu hakim karir Tipikor yang menyidangkan perkara Tipikor mendapat tugas keluar kota untuk mengikuti pelatihan sebanyak dua kali dengan surat tugas yang pertama surat tugas nomor : W17.U1/1988/KP.11.01/IX/2011 tanggal 7 September 2011, yang kedua dengan surat tugas nomor : W17.U1/2525/KP.11.01/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 dan hakim adhock Tipikor juga mendapat tugas pelatihan diluar kota dengan surat tugas nomor : W17.U1/2334/KP.11.01/XI/2011 tanggal 10 November 2011.
- 2) Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan yang berdomisili di Kabupaten Melawi karena perkara tersebut kejadiannya di kabupaten Melawi, pekerjaan saksi banyak pegawai negeri sipil bahkan ada yang pejabat (kepala dinas) dan asisten pada Pemkab Melawi sehingga kehadirannya sebagai saksi dipersidangan menunggu saat-saat tidak mengganggu tugas-tugasnya.

Penutup

Hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak dikarenakan

- a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan;
- b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar Kota Pontianak dan banyaknya saksi dari PNS yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga belum dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan.
- c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan.

Dampak positif dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 adalah: (a) Untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari pengadilan; (b) Mendorong peningkatan kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara; (c) Untuk menekan menumpuknya tunggakan perkara di semua tingkatan peradilan. Sedangkan dampak negatifnya memunculkan anggapan bahwa majelis hakim tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu dan stigma mafia peradilan.

Dalam upaya pembaharuan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009, Ketua Mahkamah Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 Tentang Susunan Tim Pembaharuan Peradilan. Hasil kerja Tim tersebut telah memformulasikan : (1) Program Peningkatan Manajemen Perkara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; (2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum; (3) Program Peningkatan Pengawasan Internal; dan (4) Program Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran* Ahmad Ali, 2002. Menyimak Tabir Hukum, Jakarta : Gunung Agung.

Andi Hamzah, 2002. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 2002. KUHP dan KUHP, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Bambang Poernomo, tt. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

_____, 1988. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jakarta : Amarta Buku*.

_____, 1993. Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.

Barda Nawawi Arief, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

_____, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2007. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP.

Cik. Hasan Bisri, 2000. Peradilan Agama di Indonesia, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.

Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003. *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.

ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.

_____, 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York.

Henry Campbel, 1999. *Black, Black's Law Dictionary St Paul Minn*, West Group.

Jan Michiel Otto, 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang [Reële Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden]*, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : PT. Jambatan.